

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

¹⁷ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah itu dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab

¹⁷ Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 28.

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁸

Di dalam perspektif sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran yang oleh pada anak pada masa perkembangannya yaitu:¹⁹

- 1) Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain;
- 2) Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab lagi;
- 3) Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk

¹⁸ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 8.

¹⁹ Hartini G Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 53-54.

menjadi dewasa.²⁰ Berikut ini merupakan uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian anak dalam KUHP Pasal 45 ini, dapat diartikan bahwa yang pada intinya anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu Terdapat kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.²¹

2) Konvensi Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :²²

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

²⁰ Anton M. Moeliono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm.30.

²¹ Lihat Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

²² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”;²³

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan :²⁴

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan :²⁵

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

²³ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

7) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa :²⁶

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. Hak-hak anak

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara apapun dan bagaimanapun statusnya, pada dirinya telah melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang terlantar, tidak mendapat kehidupan yang layak, kurangnya pendidikan, kurangnya kasih sayang orang tua bahkan ada yang menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan baik dari orang tua kandung sendiri maupun orang lain, anak yang memiliki kehidupan yang tidak menentu, masa depan yang tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam hal ini banyak upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu sebagai orang dewasa sudah seharusnya melindungi dan menjaga mereka dari berbagai macam bentuk ancaman eksploitasi maupun diskriminasi, dan memberikan pendidikan dan pengetahuan yang selayaknya agar terpenuhi hak dan kewajibannya.

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Didalam islam pun diatur mengenai hak-hak anak dimana haknya harus terpenuhi dan dijaga oleh orang tua ataupun orang lain yang ada disekitarnya hak-haknya diantaranya adalah:

- a. Hak mendapatkan perlindungan; hak anak yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai tuhan;
- b. Hak untuk hidup; hak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hak eksistensi manusia, yaitu hak asasi, dimana hak tersebut telah melekat semenjak lahir dimuka bumi ini;
- c. Hak anak-anak terhadap pengasuhan yang baik; sudah sepantasnya orang tua memberikan pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya, dan mampu menafkahi anak-anaknya;
- d. Hak anak-anak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam interaksi; keadilan dan persamaan dalam pandangan islam menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan anak, keadilan dan persamaan dalam hal ini bukan dalam artian ketika kebutuhan anak perempuan disamakan dengan kebutuhan anak laki-laki, namun yang dimaksud dengan keadilan dan persamaan adalah menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing;

- e. Hak mendapatkan pendidikan; mendidik anak sangat penting, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang diberikan di rumah terutama pendidikan mengenai agama dan pendidikan budi pekerti akhlaqul karimah.

PBB melalui pembentukan Konvensi Hak Anak telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²⁷ Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang dipegang dalam upaya pemenuhan hak anak antara lain:

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Yang terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- d. Menghargai pandangan anak.

sehingga dapat dirumuskan bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a) Hak dan kebebasan sipil;
- b) Hak atas lingkungan keluarga;
- c) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d) Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Hak atas perlindungan khusus.

²⁷ Muhadar. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara. Hlm.72.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali pada tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini dikenal orang banyak istilah yang digunakan adalah antropologi kriminal.²⁸ Menurut W.A.Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Menurut J. Constant, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²⁹

Kriminologi diartikan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Paul Moedigdo Moeliono mendeskripsikan kriminologi sebuah `masalah di dalam diri manusia. Kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam melakukan pendekatan dan menyelesaikan sebuah masalah kejahatan sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang penuh menjadi sebuah ilmu manusia yang berdiri sendiri.³⁰

²⁸ Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm.20.

²⁹ A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar. Hlm. 1.

³⁰ Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit Airlangga. Hlm.16.

Menurut Mudigdo Moeliono, Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat. Menurut A.W. Wood, Mengatakan bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dari teori atau pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, di dalamnya termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan penjahat.³¹

2. Teori – Teori Kriminologi

a. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* (1934). Sutherland berpandangan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial.

Terdapat dua versi teori *differential association*. Versi pertama Sutherland tertuju pada pengaruh konflik budaya, keberantakan sosial, dan *differential association*. Berdasarkan pengaruh tersebut, kemudian ia menyimpulkan bahwa muncul teori ini didasarkan pada 3 hal, yaitu :

³¹ Ibid, Hlm. 2.

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.³²

Kemudian versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Artiannya bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari orang tua akan tetapi diperoleh dari hasil yang dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.³³

b. Teori Differential Opportunity

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity : a theory of Delinquent Gang* (1960). Teori ini pada dasarnya berorientasi dan membahas Penyimpangan di wilayah perkotaan. penyimpanan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan

³² Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta. Thafa Media. Hlm 90-91

³³ Ibid, Hlm. 91.

yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.³⁴

Cloward dan Ohlin berpandangan bahwa para remaja akan melakukan kejahatan apabila terhadap tekanan tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal .artinya bahwa para remaja tidak akan melakukan kejahatan dan akan taat pada norma-norma Apabila tidak terdapat tiga hal tersebut di atas yakni tekanan-tekanan ,ketegangan-ketegangan dan keadaan yang tidak normal.³⁵

c. Teori Anomi

Pertama kali diperkenalkan oleh emile durkheim yang mana istilah ini dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan deregulasi didalam masyarakat karena tidak ditaatinya aturan aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga menyebabkan deviasi.³⁶

d. Social Learning Theory

Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

e. Teori *Culture Conflict*

³⁴ Ibid, Hlm.102-103.

³⁵ Ibid, Hlm. 104.

³⁶ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Cetakan ke-14 Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 59.

Teori kultur konflik pertama kali dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*. konflik merupakan permasalahan nilai sosial , kepentingan dan norma . konflik norma perilaku dapat timbul karena perbedaan nilai sosial antar kelompok . Begitu juga dengan konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota.³⁷

f. Teori *Labeling*

Teori ini merupakan teori baru yang muncul pada awal tahun 1960-an yang mana untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan. Teori labeling menekankan pada dua hal yaitu permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu di cap atau diberi label serta efek dari label tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai permasalahan kejahatan yang dilakukan FM Lemert membedakan dalam tiga bentuk penyimpangan yaitu individual deviasi yang diakibatkan oleh psikis dari dalam, situasional deviasi yang diakibatkan oleh tekanan dari keadaan, dan sistematik deviasi sebagai pola-pola perilaku kejahatan yang terorganisir dalam sistem tingkah laku.³⁸

Teori-teori tersebut di atas berkaitan erat dengan juvenile delinquency yang mana membahas mengenai sebab-sebab

³⁷Op.Cit Indah Sri Utari, Hlm 106.

³⁸Ibid, Hlm. 108-109.

terjadinya kenakalan remaja sebagaimana dinyatakan oleh Albert bandura tokoh utama teori pembelajaran sosial bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh Bagaimana anak tersebut belajar bertindak laku melalui peniruan tingkah laku orang lain terutama dari keluarga budaya dan media massa.³⁹

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu kriminologi Teoritis dan Kriminologi praktis.⁴⁰

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap pembagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosial criminal adalah :

³⁹ Op.Cit .Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Hlm. 55.

⁴⁰ Op.Cit . Ismail Rumadan, Hlm. 11.

- a) Etiologi sosial : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab - sebab timbulnya kejahatan.
- b) Geografis : Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c) Klimatologis: Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a) Tipologi : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan golongan penjahat.
- b) Psikologi sosial criminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan dalam masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) ditentukan dua macam hukuman

yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan adapun pidana tambahan yaitu perampasan barang, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.⁴¹

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah :

1) Criminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

2) Politik Criminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadiladilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh

⁴¹ *Op.Cit*, A.S.Alam, Hlm. 4-5.

semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.⁴²

Menurut Boger pembagian kriminologi sebagai berikut :

- a) *Antropologi criminal* Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat.
- b) *Sosiologi criminal* Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial.
- c) *Psychology criminal* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang

⁴² Ibid, Hlm. 7.

menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.⁴³

- d) *Psycho dan neuro criminal* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e) *Penology* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁴⁴

Menurut Sutherland pembagian kriminologi sebagai berikut :

- a) *Sosiologi hukum* Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak adalah hukum. Oleh karena itu, di dalam mencari sebab-musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana.
- b) *Aetiologi kejahatan* Merupakan cabang dari ilmu kriminologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari suatu sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan.

⁴³ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, Hlm. 28.

⁴⁴ Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hlm. 30.

c) Penology Ilmu pengetahuan tentang hukuman.

Sutherland memasukkan dan menambahkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁴⁵

4. Objek Kriminologi

Dengan demikian secara singkat dapat di uraikan bahwa objek kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa setiap tingkahlaku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundangundangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masi hidup dalam masyarakat. Adapun unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan itu ada tujuh perbuatan yang menimbulkan kerugian :

⁴⁵ Ibid, Hlm. 33.

- 1) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab undang undang hokum pidana (selanjutnya disebut KUHP).
- 2) Harus ada perbuatan.
- 3) Harus ada maksud jahat.
- 4) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 5) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- 6) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

R.Susilo, mengemukakan bahwa kejahatan sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Maka perundang-undangan itu harus dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan terjaminnya kepastian Yang tertera di Pasal 1 KUHP yang artinya : ⁴⁶

“Tiada suatu perbuatan yang dapat di kenakan pidana selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya”.

b. Pelaku dan Penjahat

Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang di anut dalam masyarakat. Pada umumnya di fikiran masyarakat perkataan “penjahat” berarti

⁴⁶ Lihat Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

mereka yang dimusuhi oleh masyarakat. Adapun jenis penjahat adalah :

- 1) Penjahat dari kecenderungan (bukan karna bakat) ;
- 2) Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit tidak melakukan kejahatan) ;
- 3) Penjahat karna hawa nafsu dan putus asa.⁴⁷

Menurut Ruth Shonle Cavam ada 9 tipe penjahat yaitu :

- 1) *The casual offender* Tipe ini sebenarnya belum dapat dikatakan penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak memakai lampu pada malam hari, tidak memakai helm;
- 2) *The occasional criminal* Orang ini melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak seseorang sampai luka ringan;
- 3) *The episodic criminal* Disebabkan kerana aemosi yang sangat hebat, sehingga kehilangan control diri;
- 4) *The habitual criminal* Mereka yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera di dalam pasal 104-485 KUHP. Juga residivist;
- 5) *The professional criminal* Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Seperti; penyelundupan, korupsi, penjualan narkotika;

⁴⁷ Ibid, Hlm. 57.

- 6) *Organized criminal* Pelaku kejahatan yang membentuk organisasi yang rapi untuk melakukan kejahatan;
- 7) *The mentally abnormal* Penjahat ini memiliki penyakit psycopatis;
- 8) *The normalicious criminal* Perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebut bukan kejahatan;
- 9) *The white collar criminal* Kejahatan ini dilakukan oleh seseorang dari upper class di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan baik dibidang ekonomi maupun sosial politik, terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakatnya.⁴⁸

Adapun sebab adanya penjahat antara lain yaitu :

- 1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan;
- 2) Perbedaan ideologi politik;
- 3) Kepadatan dan komposisi penduduk;
- 4) Perbedaan distribusi kebudayaan;
- 5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan;
- 6) Mentalitas yang labil;
- 7) Faktor lain seperti faktor biologis, psikologi, dan sosioemosional; Kejahatan dan penjahat merupakan satu

⁴⁸ Marsy Fashadhin. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*. Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm. 18

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada penjahat disitu pula terjadi kejahatan dan begitupun selanjutnya. Kejahatan kerap kali mengganggu kestabilan dan keamanan dalam masyarakat.

Adapun akibat adanya penjahat dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Merugikan pihak lain baik materil maupun non materil;
- 2) Merugikan masyarakat secara keseluruhan;
- 3) Merugikan negara;
- 4) Mengganggu kestabilan dalam masyarakat.⁴⁹

5. Teori Penyebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori oleh A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada intinya mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

⁴⁹ Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Fisip UI Press. Hlm 16

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- 4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.⁵⁰

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari dalam diri), fakto eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

b. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :⁵¹

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar

⁵⁰ Soejono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan* (Crime Prevention). Alumni. Bandung. Hlm. 42.

⁵¹ Romli atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Tarsito. Hlm. 32.

seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok social atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha - usaha sebagai berikut : “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.⁵²

- 1) Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- 2) Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

⁵² Ibid, Hlm. 61.

- a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b) Peradilan yang objektif;
- c) Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
- d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e) Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f) Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan dilakukan oleh aparat eksekusi serta orang biasa.⁵³ Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan bahwa “Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan”.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

⁵³ Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 11.

6. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing antara lain :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁵⁴

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting sebagai berikut :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

⁵⁴ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta. Liberti. Hlm. 46.

- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b) Sistem peradilan yang objektif
 - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.⁵⁵
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.
- b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa

⁵⁵ Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Hlm. 15.

yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁵⁶

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang

⁵⁶ Simanjuntak B dan Chairil Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung. Trisito. Hlm. 399.

pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik;
- 2) Peradilan yang efektif;
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;
- 4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparaturnya yang serasi;
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Aksi Kekerasan

Pengertian kata “aksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tindakan balasan, sedangkan arti kata “ Kekerasan “ adalah perbuatan seseorang ataupun kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau

barang orang lain.⁵⁷ Sehingga aksi kekerasan adalah suatu tindakan pembalasan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vadetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale nada (life is worth nothing)* di El Salvador yang ditempatkan dibelakang kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering kali ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan “kekerasan” yang dengan sendirinya maka disebut kejahatan.⁵⁸

Menurut Santoso: kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁵⁹

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁶⁰

Jika dilihat dari definisi diatas, maka terlihat bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan peraturan undang-undang. Baik berupa ancaman ataupun sudah dalam bentuk

⁵⁷ <http://bahasa.kemdiknas.go.id>, 31 Mei 2018 pukul 15. 30.

⁵⁸ Hagan, *Modern Criminology : Crime, Criminal Behavior, and Its Control*, McGraw Hill Intern, 1987 dalam Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H, LL.M, *Teori Kapita Selektif dan Kriminologi*, Reflika Aditama, 2007, Hlm. 65.

⁵⁹ Op. Cit., Topo Santoso, Hlm. 24.

⁶⁰ Yesmil Anwar. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. 2004. Bandung. UNPAD Press. Hlm. 54.

tindakan nyata yang memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun apabila dilihat dari sisi kriminologi, Maka kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda mengenai motif maupun tindakannya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut :⁶¹

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidertasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidertasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang

⁶¹ R. Soesilo.1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal Politea*. Bogor. Sinar Grafika. Hlm.84-85.

bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.⁶²

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :⁶³

- a. Kekerasan Fisik, bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.
- b. Kekerasan Psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

⁶² M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya. Reality Publisher. Hlm. 34.

⁶³ Johan Galtung. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta. Graha Putra. Hlm.62

c. Kekerasan Seksual, kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

D. Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."⁶⁵

Fenomena kejahatan tindak pidana sebagai salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan bentuk masalah sosial, bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁶⁶

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social*

⁶⁴ Ibid. Hlm. 62.

⁶⁵ Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 54.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 49.

welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶⁷

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a. Penanggulangan Melalui Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu,

⁶⁷ Ibid. Hlm. 2.

melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁶⁸

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶⁹

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan,

⁶⁸ Ibid. Hlm. 46.

⁶⁹ Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni. Hlm. 390.

karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁷⁰

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

b. Penanggulangan Melalui Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

⁷⁰ Op. Cit. Hlm. 182.

kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.⁷¹

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang

⁷¹ Op.Cit. Barda Nawawi Arief. Hlm. 46.

harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁷²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁷³

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 159.

⁷³ M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 20.

non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.⁷⁴

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian yang spesifik dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁷⁵

⁷⁴ Op. Cit. Barda Nawawi Arief. Hlm. 48.

⁷⁵ IS Heru Permana. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm. 12.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan :

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.”⁷⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakukan memanfaatkan atau memeras anak memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan.⁷⁷

⁷⁶ Op. Cit. Bonger. Hlm. 67.

⁷⁷ Lihat Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Eksplotasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dengan cara penghisapan, pemerasan dan lain sebagainya. Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.⁷⁸ Eksplotasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berelbihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁷⁹

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO dan berdasarkan Konvensi ILO nomor.128 adalah sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam bentuk konflik senjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan;

⁷⁸ Amin Suprihatini. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak, cet. Ke-1*. Klaten: Cempaka Putih. Hlm. 67.

⁷⁹ Benedicta Desca Prita Octalina. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hlm. 25-27.

- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral baik.

Eksplotasi terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak berperikemanusiaan. Setiap orang yang dieksploitasi yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak berkembang. Dengan usianya yang masih di bawah umur apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya akan mempengaruhi tumbuh kembang baik itu dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anakpun akan sedikit menyimpang karena terbiasa terhadap dunia jalanan, dengan demikian apa yang mereka lihat ketika mereka berada di jalan, akan menjadi contoh perilaku bagi mereka.

a. Hak-hak Anak

Menurut pasal 13 Undang – Undang U Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua atau wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan,

- a) Diskriminasi;
- b) Penelantaran;
- c) Kekejaman; kekerasan dan penganiayaan;
- d) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- e) ketidakadilan dan;
- f) Perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 2) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.

Jika seorang anak dieksploitasi maka pihak pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus. Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-sewenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

b. Kesejahteraan Anak

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera

dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.⁸⁰

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:⁸¹

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

c. Bentuk-bentuk eksploitasi anak

- 1) Eksploitasi Fisik

⁸⁰ Ardani Mahendra. 2014. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)," *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu. Hlm. 37.

⁸¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Eksplorasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisiknya.⁸²

2) Eksploitasi Sosial

Eksplorasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya.⁸³

3) Eksploitasi Seksual

Eksplorasi seksual adalah melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual

⁸² Meivy R. "Tumengkol, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin* Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016. Hlm 4.

⁸³ Ibid, Hlm. 5

tersebut dalam bentuk perlakuan tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada sifat pomografi, perkataan-perkataan porno, sehingga membuat anak menjadi malu, menelanjangi anakanak, menjerumuskan anak-anak pada prostitusi, memanfaatkan anak-anak untuk produk pornografi.⁸⁴

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan

⁸⁴ Ibid, Hlm. 6

belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Undang – Undang

1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

Dalam Undang – undang ini, selain menyebutkan hak – hak anak dan kewajiban anak, juga dicantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran eksploitasi dan tindak pidana eksploitasi anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 76 huruf I yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”⁸⁵

berkaitan dengan hal tersebut maka adanya hukuman yang cukup berat atau ketentuan peralihannya yang diantaranya Pasal 88 yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”⁸⁶

2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸⁵ Lihat Pasal 76 Huruf I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

⁸⁶ Lihat Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Yang dimana tindakan yang melakukan pelanggaran eksploitasi dan tindak pidana eksploitasi anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yakni yang menyebutkan bahwa :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁸⁷

Pasal 2 Menyebutkan bahwa :

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”⁸⁸

Yang dimana mempunyai ketentuan pidana yakni terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

⁸⁷ Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁸ Lihat Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).⁸⁹

3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Yang dimana tindakan yang melakukan pelanggaran eksploitasi dan tindak pidana eksploitasi anak hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam undang undang ini yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁹⁰

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹¹

Penjelasan : Pasal 2 Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

⁸⁹ Lihat Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁹¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan eksploitasi dalam UU ini dapat dilihat pengertiannya, yaitu :

- 1) Memperalat : Menggunakan atau memperlakukan sebagai alat : ia telah, orang itu untuk mencapai maksudnya;⁹²
 - 2) Memanfaatkan : Menjadikan ada manfaatnya ;⁹³
 - 3) Memeras : Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain, meminta uang dengan ancaman;⁹⁴
 - 4) Keuntungan : Hal mendapat untung (laba), manfaat, faedah.⁹⁵
- a) Pasal 13
- “Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan salah lainnya”.
- b) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Hlm. 24

⁹³ Ibid, Hlm. 626

⁹⁴ Ibid, Hlm. 752

⁹⁵ Ibid, Hlm. 1108